

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria atau indikator yang menjadi pertimbangan dalam memberikan grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mensistematiskan, menginterpretasi, mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pemberian grasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang grasi namun belum mengatur secara khusus pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba diatur di dalam Undang-Undang; 2) kriteria atau indikator presiden dalam memberikan grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai grasi haruslah mengatur secara khusus pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, serta mengatur mengenai secara jelas mengenai kriteria atau indikator presiden dalam memberikan Keputusan grasi sehingga dapat dijadikan dasar penilaian presiden.

Kata Kunci: *Grasi, Tindak Pidana Narkoba.*

ABSTRACT

This research aims to 1) Determine and analyze the legal regulations governing the granting of clemency to drug offenders; 2) Identify and analyze the criteria or indicators considered in granting clemency to drug offenders. The research method used is the juridical normative legal research method, and the approaches employed include the normative approach, conceptual approach, and case approach. The legal material analysis in this study involves identifying, systematizing, interpreting, and evaluating all relevant legislation and legal materials. The research findings indicate that 1) The regulation of clemency is stipulated in Law No. 22 of 2002 in conjunction with Law No. 5 of 2010 concerning Clemency, but it does not specifically regulate the granting of clemency to drug offenders; 2) The criteria or indicators used by the president in granting clemency to drug offenders are not clearly defined in Law No. 22 of 2002 in conjunction with Law No. 5 of 2010 concerning Clemency. From the research results, it can be concluded that in the drafting of legislation regarding clemency, specific provisions regarding the granting of clemency to drug offenders should be included, and clear criteria or indicators for the president in making clemency decisions should be established to serve as the basis for presidential judgment.

Keywords: *Clemency, Narcotics Offense*